



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TALU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jati II

Pasaman Barat - Sumatera Barat 26366

Telp. 07537464094 Fax. 07537464022

e-mail : pa_talu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Talu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Talu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Talu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, 17 Februari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Nurmatias, S. Ag

NIP. 197403312006041005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel dan Lampiran	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	xi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
V. Catatan atas Laporan Keuangan	16
A. Penjelasan Umum	16
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Talu	16
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.3. Basis Akuntansi	17
A.4. Dasar Pengukuran	18
A.5. Kebijakan Akuntansi	18
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	27
B.1. Pendapatan	27
B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	27
B.2. Belanja	29
B.2.1. Belanja Pegawai	30
B.2.2. Belanja Barang	31
B.2.3. Belanja Modal	32
B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33
B.2.3.2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1. Aset Lancar	35

C.1.1.	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	35
C.1.2.	Persediaan	36
C.2.	Aset Tetap	37
C.2.1.	Tanah	37
C.2.2.	Peralatan dan Mesin	38
C.2.3.	Gedung dan Bangunan	38
C.2.4.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	39
C.2.5.	Aset Tetap Lainnya	40
C.2.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	40
C.3.	Aset Lainnya	41
C.3.1.	Aset Tak berwujud	42
C.3.2.	Aset Lain-lain	42
C.3.3.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	43
C.4.	Kewajiban Jangka Pendek	43
C.4.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	43
C.5.	Ekuitas	44
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	45
D.2.	Beban Pegawai	45
D.3.	Beban Persediaan	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa	47
D.5.	Beban Pemeliharaan	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	48
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
D.8.	Kegiatan Non Operasional	49
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
E.1.	Ekuitas Awal	51
E.2.	Surplus (defisit) LO	51
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	51
E.3.1.	Selisih Revaluasi Aset	51

E.3.2.	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	52
E.4.	Transaksi Antar Entitas	53
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	53
E.4.2.	Transfer Masuk / Transfer Keluar	53
E.5.	Ekuitas Akhir	54
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	55
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	55
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	55
F.2.1.	Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK	55
F.2.2.	Rekening Pemerintah	55
F.2.3.	Revisi DIPA	55
F.2.4.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB	56
F.2.5.	Catatan Penting Lainnya	56

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020	2
Tabel 3 Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	3
Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	3
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	23
Tabel 6 Penggolongan Kualitas Piutang	25
Tabel 7 Tabel Masa Manfaat	26
Tabel 8 Revisi Anggaran	27
Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi PNB per 31 Desember 2021	27
Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNB per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	28
Grafik 11 Perubahan PNB Tahun 2020 dan 2021	28
Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021	29
Grafik 13 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021	29
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020	30
Tabel 15 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	31
Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	32
Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020	33
Tabel 18 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020	33
Tabel 19 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	35
Tabel 20 Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021	35
Tabel 21 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	36
Tabel 22 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	37
Tabel 23 Rincian Saldo Tanah	37
Tabel 24 Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2021	39
Tabel 25 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021	39
Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021	41
Tabel 27 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	41
Tabel 28 Rincian Aset tak Berwujud TA 2021	42
Tabel 29 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2021	43
Tabel 30 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	43
Tabel 31 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2021	44
Tabel 32 Rincian PNB TA 2021 dan TA 2020	45
Tabel 33 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	45
Tabel 34 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	46
Tabel 35 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	47
Tabel 36 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	48
Tabel 37 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	48
Tabel 38 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020	49
Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020	49
Tabel 40 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per Akun TA 2021	52

Tabel 41 Transaksi Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021	52
Tabel 42 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021	53
Tabel 43 Perbandingan DDEL dan DKEL TA 2021 dan 2020	53
Tabel 44 Perbandingan Transfer Masuk dan Transfer Keluar TA 2021 dan 2020	54
Tabel 45 Revisi Satker TA 2021	55
Tabel 45 Daftar Ralat SPM, SSBP dan SSPB TA 2021	56

Lampiran :

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/ Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



PENGADILAN AGAMA TALU

Jalan Jati II Simpang Empat Telp.(0753) 7464094 Fax (0753) 7464022

Website : www.pa-talu.net Email: pa_talu@yahoo.co.id

Pasaman Barat – Sumatera Barat. 26366

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Talu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 17 Februari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Nurmatias, S. Ag

NIP. 197403312006041005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Talu Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 178.661 atau mencapai 65 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 275.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp 3.057.203.554 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.102.295.000

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	275.000	178.661	65	298.980
Belanja Negara	3.102.295.000	3.057.203.554	99	3.503.124.787

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4.141.231.516, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 4.278.063, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 4.136.953.453, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 12.331.000 dan Rp 4.128.900.516.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2021	2020	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	4.278.063	2.854.000	1.424.063	49.90
Aset Tetap	4.136.953.453	4.747.495.080	(610.541.672)	(12.86)
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	4.141.231.516	4.750.349.080	(609.117.564)	912.82)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	12.331.000	12.026.639	304.361	2.53
Jumlah Kewajiban	12.331.000	12.026.639	304.361	2.53
Ekuitas				
Jumlah Ekuitas	4.128.900.516	4.738.322.441	(609.421.925)	(12.86)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.141.231.516	4.750.349.080	(609.117.564)	(12.86)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 178.661, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.260.054.446 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (3.259.875.785), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos

Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp 0,00 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (3.259.875.785).

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tanggal LO		Kenaikan/Penurunan	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	178.661	298.980	(42.591.375)	(14.990)
Beban Operasional	3.260.054.446	3.434.208.273	(174.153.827)	(5.071)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(3.259.875.785)	(3.433.909.293)	174.033.508	(5.068)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(462.100)	(462.100)	100
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	(462.100)	(462.100)	100
Pos Luar Biasa	0	0	0	0
Surplus (Defisit) - LO	(3.259.875.785)	(3.434.371.393)	174.495.608	(5.081)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 4.738.322.441 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (3.259.875.785), ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.650.453.860 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 4.128.900.516.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tanggal LPE		Kenaikan/Penurunan	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Rp	%
EKUITAS AWAL	4.738.322.441	4.671.268.027	67.054.414	
Surplus (Defisit) LO	(3.259.875.785)	(3.434.371.393)	174.495.608	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	0	0	0	
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0	(1.400.000)	1.400.000	
Transaksi Antar Entitas	2.650.453.860	3.502.825.807	(852.371.947)	

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(609.421.925)	67.054.414	(676.476.339)
EKUITAS AKHIR	4.128.900.516	4.738.322.441	(609.421.925)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Pendapatan Negara, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara dan Hibah, untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

Pengadilan Agama Talu
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
		Anggaran	Realisasi	% thd Angg	Realisasi
A. Pendapatan	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	275.000	178.661	65	298.980
Jumlah Pendapatan		275.000	178.661	65	298.980
B. Belanja	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	2.193.280.000	2.151.028.260	98	2.242.975.896
2. Belanja Barang	B.2.2.	871.515.000	868.675.294	100	899.717.891
3. Belanja Modal	B.2.3.	37.500.000	37.500.000	100	360.431.000
Jumlah Belanja		3.102.295.000	13.653.098.330	99	3.503.124.787

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

Pengadilan Agama Talu
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1. 1.	794.063	0
Persediaan	C.1. 2.	3.484.000	2.854.000
Jumlah Aset Lancar		4.278.063	2.854.0000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	1.711.651.000	1.863.461.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.111.916.420	2.074.416.420
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	2.138.646.000	2.449.422.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	49.819.000	49.819.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	66.999.618	66.642.409
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(1.942.078.585)	(1.756.265.749)
Jumlah Aset Tetap		4.136.953.453	4.747.495.080
Aset Lainnya	C.3		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	100.000	100.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	(100.000)	(100.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		4.141.231.516	4.750.349.080
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	12.331.000	12.026.639
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		12.331.000	12.026.639
Jumlah Kewajiban		12.331.000	12.026.639

EKUITAS			
Ekuitas	C.5	4.128.900.516	4.738.322.441
Jumlah Ekuitas		4.128.900.516	4.738.322.441
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		4.141.231.516	4.750.349.080

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

Pengadilan Agama Talu
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	178.661	298.980
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.151.386.260	2.243.283.896
Beban Persediaan	D. 3	38.171.300	41.134.900
Beban Barang dan Jasa	D. 4	569.267.142	553.356.307
Beban Pemeliharaan	D. 5	195.819.150	236.870.401
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	63.940.000	75.500.800
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	241.470.594	284.061.969
Jumlah Beban		3.260.054.446	3.434.208.273
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.259.875.785)	(3.433.909.293)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	287.400
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	749.500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D. 8	0	(462.100)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(3.259.875.785)	(3.434.371.393)
Pos Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(3.259.875.785)	(3.434.371.393)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Pengadilan Agama Talu
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	4.738.322.441	4.671.268.027
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.259.875.785)	(3.434.371.393)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E. 3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E 3.2	0	1.400.000
Transaksi Antar Entitas	E. 4	2.650.453.860	3.502.825.807
Ekuitas Akhir	E. 5	4.128.900.516	4.738.322.441

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Talu

Tahun 2004 adalah menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut memuat beberapa perubahan antara lain semakin bertambahnya kewenangan mengadili bagi Peradilan Agama yaitu mengenai Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat , Hibah , Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk itu, Pengadilan Agama Talu telah menetapkan visi yang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Talu Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Talu;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Talu;
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya Aparatur Pengadilan Agama Talu;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Administrasi Pengadilan Agama Talu yang akuntabel;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Talu menyusun rencana strategis dengan tujuan:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara Melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Talu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000

(tiga ratus ribu rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 6 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Talu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi saat pelaksanaan.

Perubahan anggaran dari awal tahun hingga akhir tahun berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8 Revisi Anggaran

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	275.000	275.000
Jumlah Pendapatan	275.000	275.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.225.980.000	2.193.280.000
Belanja Barang	827.975.000	862.915.000
Belanja Modal	37.500.000	37.500.000
Jumlah Belanja	15.566.090.000	13.701.648.000

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan: Rp
178.661

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 178.661 atau mencapai 65 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 275.000. Keseluruhan Pendapatan yang diterima oleh Pengadilan Agama Talu merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP:
Rp 178.661

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 178.661 atau mencapai 65 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 275.000. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	275.000	178.661	65
Total Pendapatan		275.000	178.661	65

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar 26 persen dibanding realisasi pendapatan TA 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini, rumah dinas tidak ditempati oleh pegawai pengadilan Agama Talu

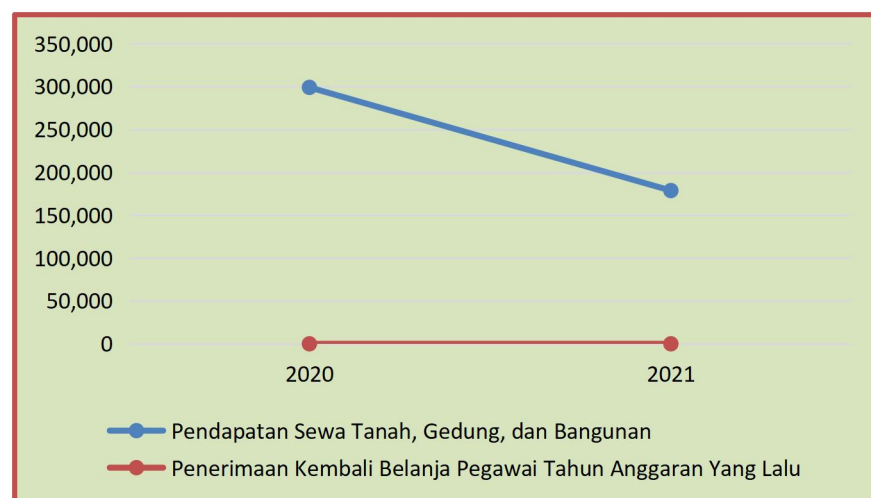
Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	178.661	298.980	(120.319)	(26)
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	60	0	0
Total Pendapatan		178.661	298.980	(120.319)	(26)

Perubahan pendapatan dari tahun 2020 ke 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 11 Perubahan PNBP Tahun 2020 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)



B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
3.057.203.554*

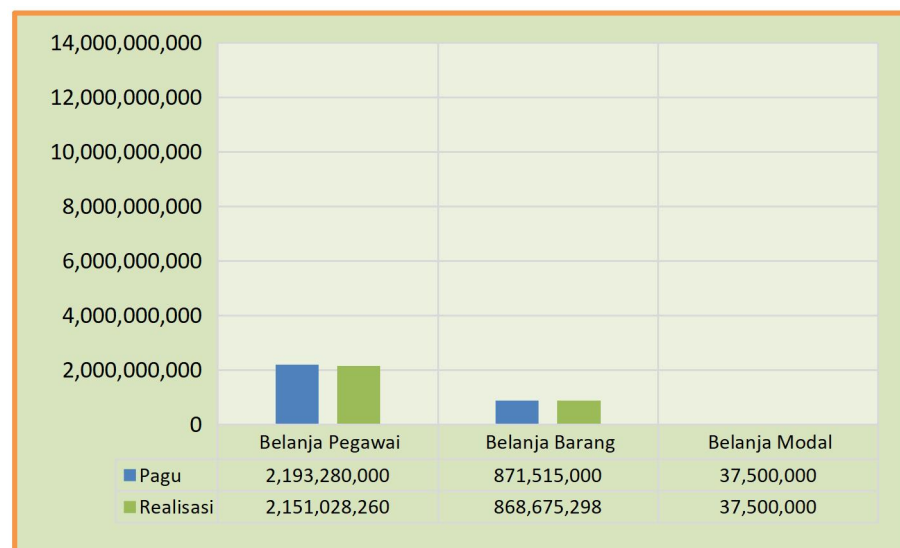
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.057.203.554. setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99 persen dari anggaran senilai Rp 3.102.295.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.193.280.000	2.151.028.260	98
Belanja Barang	871.515.000	868.675.294	100
Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	100
Total Belanja Bruto	3.102.295.000	3.057.203.554	99
Pengembalian Belanja		(45.091.446)	
Total Belanja Netto	3.102.295.000	3.057.203.554	99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 13 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)



Dibanding tahun 2020, realisasi belanja tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1

persen. Penurunan ini terjadi pada klasifikasi belanja barang dan belanja pegawai dan belanja modal. Hal ini disebabkan antara lain :

- Realisasi belanja pegawai lebih sedikit dibanding tahun 2020 karena jumlah pegawai berkurang pada tahun 2021.
- Belanja modal tahun 2020 lebih besar dari belanja modal tahun 2021

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.151.028.260	2.242.975.000	(91.897.636)	(4.097)
Belanja Barang	868.675.294	899.717.891	(31.042.597)	3.57
Belanja Modal	37.500.000	360.431.000	(322.931.000)	861
Total Belanja	3.057.203.554	3.503.124.787	(445.921.233)	14.58

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
2.151.028.260

Realisasi Belanja Pegawai pada lingkup Pengadilan Agama Talu meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/ POLRI. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp **2.151.028.260** dan Rp **2.242.975.000**.

Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 4.097 persen dari tahun 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- Lebih banyaknya pegawai yang pensiun dan pindah di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dimana adanya 1 (satu) orang pegawai Pengadilan Agama Talu yang pensiun yakni panitera muda Gugatan. Dan 2 pegawai yang pindah

- Kosongnya jabatan Kasubbag Umum Keuangan sejak dari bulan Maret sampai dengan Desember 2021.
- Kosongnya jabatan Kasubbag Kepegawaian dari bulan September sampai dengan Desember 2021.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 15 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	834.743.000	908.073.300	-73,330,300	-9
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.713	11.930	11,520	91
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56.912.230	62.694.630	-5,782,400	-10
Belanja Tunj. Anak PNS	20.507.440	23.076.160	-2,568,720	-13
Belanja Tunj. Struktural PNS	21.770.000	28.140.000	-6,370,000	-29
Belanja Tunj. Fungsional PNS	926.580.000	935.540.000	-8,960,000	-1
Belanja Tunj. PPh PNS	90.924.616	91.886.627	-962,011	-1
Belanja Tunj. Beras PNS	50.838.840	45.914.280	4,924,560	10
Belanja Uang Makan PNS	143.094.000	145.789.000	-2,695,000	-2
Belanja Tunjangan Umum PNS	5.645.000	2.220.000	3,425,000	61
Total Belanja Bruto	2.151.028.319	2.243.345.927	(92,307,351)	96.33
Pengembalian Belanja	(42.251.740)	(9.004.104)	(33.247.636)	78
Total Belanja Netto	2.193.280.000	2.251.980.000	(126.554.987)	5.8

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
868.675.294*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 868.675.294 dan Rp 899.717.891.

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 3.5 persen dibanding tahun anggaran yang lalu. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Anggaran Belanja Barang operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Pemeliharaan yang lebih kecil dibandingkan tahun lalu sehingga realisasi

belanjanya pun mengalami penurunan dari tahun lalu.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
1. Belanja Barang Operasional	435.606.460	443.565.750	-7,959,290	-2
2. Belanja Barang Non Operasional	8.600.000	0	8,600,000	100
3. Belanja Barang Persediaan	42.465.300	36.700.000	5,765,300	14
4. Belanja Jasa	125.908.384	109.877.440	16,030,944	13
5. Belanja Pemeliharaan	192.155.150	234.073.901	-41,918,751	-22
6. Belanja Perjalanan Dinas	63.940.000	75.500.800	-11,560,800	-18
Total Belanja Brutto	868.675.294	899.717.891	-31,042,597	-4
Pengembalian Belanja	2.839.706	1.169.109	1,670,597	59
Total Belanja Netto	871.515.000	900.887.000	-29,372,000	-3

Pada masa pandemi COVID-19 Pengadilan Agama Talu yang mengalokasikan anggaran belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. akun 521241 Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi sebesar Rp 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.000.000 atau sebesar 100 persen yang digunakan untuk membeli masker, face shield, handsanitiser, disinfektan, handsoap, hand schoon dan

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal :Rp
37.500.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 37.500.000 dan Rp 360.431.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 861 persen dibanding realisasi tahun anggaran yang lalu. Hal ini disebabkan karena :

- Lebih kecilnya anggaran belanja modal ditahun 2021 dibanding tahun 2020 karena pada tahun 2020 mendapat anggaran belanja modal kendaraan dinas roda empat.

Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	37.500.000	360.431.000	322.931.000	861
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	37.500.000	360.431.000	322.931.000	861
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	37.500.000	360.431.000	322.931.000	861

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Realisasi
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin:Rp
37.500.000*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 37.500.000 dan Rp 360.431.000.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar 861 persen dibanding realisasi tahun anggaran yang lalu.

Tabel 18 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	37.500.000	360.431.000	322.931.000	861
Total Belanja Brutto	37.500.000	360.431.000	322.931.000	861
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	37.500.000	360.431.000	322.931.000	861

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 adalah berupa :

- Personal Computer Unit sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp 37.500.000,-

Bukti Pengadaan Belanja Modal TA 2021 tersebut terlampir pada Data Dukung Laporan Keuangan ini.

B.2.3.2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

*Realisasi
Belanja
Penambahan
Nilai Gedung
dan
Bangunan:Rp 0*

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp . Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Talu tidak memiliki anggaran untuk Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp
4.278.063

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.278.063 dan Rp 2.854.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 19 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	794.063	0
Persediaan	3.484.000	2.854.000
Total Aset Lancar	4.278.063	2.854.000

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja
Dibayar
Dimuka
(Prepaid): Rp
137.642.339

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 137.642.339 dan Rp 1.810.010. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkannya secara penuh dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang/ jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 20 Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Sewa web hosting pa.talu.go.id	794.063	0
2.	Sewa domain pta-padang.go.id	0	0
3.	Sewa Mesin Fotocopi PA Se-Sumbar	0	0

Jumlah

794.063

0

C.1.2. Persediaan*Persediaan: Rp
3.484.000*

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 3.484.000 dan Rp 2.854.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	3.484.000	2.854.000
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
	Total	3.484.000	2.854.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor: W3-A14/ /PL.03/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021 yang terlampir pada data dukung Laporan Keuangan ini.

Adapun mutasi persediaan selama tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	
Pembelian Barang Konsumsi	2.788.000
Pembelian Bahan untuk Pemeliharaan	66.000
Mutasi Kurang	
Pemakaian Barang Konsumsi	
Pemakaian Bahan untuk Pemeliharaan	
Koreksi Penyesuaian Persediaan Barang Konsumsi	
Koreksi Penyesuaian Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	
Opname Fisik Barang Konsumsi	
Opname Fisik Bahan untuk Pemeliharaan	

Saldo per 31 Desember 2021

3.484.000

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
4.136.953.453*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp 4.136.953.453 dan Rp 4.747.495.080. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 22 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan (Rp)	Perubahan(%)
1	Tanah	1.711.651.000	1.863.461.000	(151.810.000)	(8.15)
2	Peralatan dan Mesin	2.111.916.420	2.074.416.420	37.500.000	1.81
3	Gedung dan Bangunan	2.138.646.000	2.449.422.000	(310.776.000)	(12.69)
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.819.000	49.819.000	0	(0)
5	Aset Tetap Lainnya	66.999.618	66.642.409	357.209	0.54
	Jumlah	6.079.032.038	6.503.760.829	(424.728.791)	10.58
	Akumulasi Penyusutan	(1.942.078.585)	(1.756.265.749)	(185.812.836)	10.58
	Nilai Buku Aset Tetap	4.136.953.453	4.747.495.080	(610.541.627)	(12.86)

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp
1.711.651.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 ada perubahan, yaitu sebesar Rp 1.711.651.000. dan Rp 1.863.461.000 Pada tahun 2021 ini tidak ada mutasi aset tanah.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 23 Rincian Saldo Tanah

No.	No. Sertifikat	Lokasi	Atas Nama	Peruntukan	Luas (m ²)	Jumlah
1.	1612/A/1993	Talu kec. Talam au	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Rumah dinas pimpinan	249	63.139.000
2.	14243/2013	Jl jati II Simpan	Pemerintah RI cq.	Tanah banguana	3.026	1.648.512.000

g Empat	Mahkamah Agung	n Pemerintah
Jumlah	3.275	1.711.651.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp
2.111.916.420

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 2.111.916.420 dan Rp 2.074.416.420.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	2.074.416.420
Mutasi Tambah	
Pembelian	37.500.000
Saldo per 31 Desember 2021	2.111.916.420
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(00)
Nilai Buku 31 Desember 2021	2.111.916.420

- 3 (tiga) buah P.C Unit, senilai Rp 37.500.000 sesuai Surat Pesanan nomor W3-A14/649/PL.04/III/2021 Tanggal 23 Februari 2021 dan sudah diterima sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor A14/650/PL.04/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 2021 sebagaimana terlampir dalam data pendukung laporan keuangan ini.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
2.138.646.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing - masing adalah sebesar Rp 2.138.646.000 dan Rp 2.449.422.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	2.449.422.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(310.776.000)
Koreksi Kesalahan input IP	0
Saldo per 31 Desember 2021	2.138.646.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(21.050.487)
Nilai Buku 31 Desember 2021	1.917.595.513

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Agama Talu sebesar Rp.(310.776.000)

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
49.819.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 49.819.000 dan Rp 49.819.000.

Mutasi transaksi terhadap nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	49.819.000
Mutasi Kurang:	

Koreksi Kesalahan input IP	0
Saldo per 31 Desember 2021	49.819.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	49.819.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
66.999.618*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp 66.999.618.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	66.642.409
Akumulasi tambah s.d 31 Desember 2021	357.209
Nilai Buku 31 Desember 2020	66.999.618

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(1.942.078.585)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp (1.942.078.585) dan Rp (1.766.265.749).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A

Laporan Keuangan ini.

Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2	Peralatan dan Mesin	2,111,916,420	(1.714.177.985)	387.738.435
2	Gedung dan Bangunan	2,138,646,000	(221.050.487)	1.917.595.513
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	49,819,000	6.850.113	42.968.887
4	Aset Tetap Lainnya	66,999,618	100.000	66.999.618
	Jumlah	4,367,381,038	1,942,178,585	2.358.302.835

C.3. Aset Lainnya

*Aset Tetap : Rp
66.999.618*

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 66.999.618 dan Rp 66.642.409 turun sebesar Rp.(36.626.762) atau (7,26) persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Aset Lainnya per Jenis Aset dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Rp Naik/ (Turun)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
Aset Lain-lain	100.000	100.000	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(100.000)	(100.000)	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C.3.1. Aset Tak berwujud

Aset Tak
Berwujud :
Rp 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama yakni sebesar Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Aset tak Berwujud TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
Software Komputer		
1.	Website <i>pta-padang.go.id</i>	0
2.	Aplikasi Pustaka	0
3.	Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS and FS	0
Jumlah Total		0

Mutasi nilai aset tak berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

C.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp 0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama yakni sebesar Rp 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Talu serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	100.000
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	
Saldo per 31 Desember 2021	0

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(100.000)
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya :
Rp (100.000)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp (100.000) dan Rp.(100.000). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Aset lain-lain	Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1.	Aset tak berwujud	0	0	0
2.	Aset lain-lain	100.000	(100.000)	0
Jumlah Total		100.000	(100.000)	0

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp 12.331.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 12.331.000 dan Rp 12.026.639. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 30 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Utang Kepada Pihak Ketiga	12.331.000	12.026.639
Jumlah	12.331.000	12.026.639

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 12.331.000*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 12.331.000 dan Rp 12.026.639. Utang kepada Pihak Ketiga

merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Padang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2021

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Beban Uang Makan PNS	12.331.000	12.026.639
2.	Beban tagihan telepon	0	0
3.	Beban tagihan listrik	0	0
Jumlah		12.331.000	12.026.639

C.5. Ekuitas

Ekuitas:
Rp
4.128.900.516

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.128.900.516 dan Rp 4.739.322.441. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

PNBP : Rp
178.661

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 178.661 dan Rp 298.980. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 32 Rincian PNBP TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	178.661	298.980	(120.319)	40
	Total Pendapatan	178.661	298.980	(120.319)	40

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dari pendapatan sewa 3 unit rumah dinas.

D.2. Beban Pegawai

Beban
Pegawai : Rp
2.151.386.260

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.151.386.260 dan Rp.2.243.283.896. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	834.743.000	908.073.300	-73,330,300	-9
Beban Pembulatan Gaji PNS	12.713	11.930	11,520	91
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56.912.230	62.694.630	-5,782,400	-10

Beban Tunj. Anak PNS	20.507.440	23.076.160	-2,568,720	-13
Beban Tunj. Struktural PNS	21.770.000	28.140.000	-6,370,000	-29
Beban Tunj. Fungsional PNS	926.580.000	935.540.000	-8,960,000	-1
Beban Tunj. PPh PNS	90.924.616	91.886.627	-962,011	-1
Beban Tunj. Beras PNS	50.838.840	45.914.280	4,924,560	10
Beban Uang Makan PNS	143.094.000	145.789.000	-2,695,000	-2
Beban Tunjangan Umum PNS	5.645.000	2.220.000	3,425,000	61
Total Beban Pegawai	2.151.028.319	2.243.345.927	(92,307,351)	96.33

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
38.171.300*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 38.171.300 dan Rp 41.134.900. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Kenaikan beban persediaan disebabkan penganggaran belanja barang persediaan lebih tertib dari tahun anggaran yang lalu.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	38.171.300	41.134.900	(2.963.600)	(7.2)
Total Beban Persediaan	38.171.300	41.134.900	(2.963.600)	(7.2)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp
569.267.142*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 569.267.142 dan Rp 553.356.307. Beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan beban ini dipengaruhi oleh akun-akun pembentuknya sebagaimana di bawah ini.

Rincian beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	355.597.260	382,491,750	-26,894,490	-8
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.630.200	2,175,000	455,200	17
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37.092.000	37,812,000	-720,000	-2
Beban Barang non Operasional Lainnya	3.600.000	21,087,000	-17,487,000	-486
Beban Keperluan sehari - hari perkantoran	42.465.300		42,465,300	100
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	-	5,000,000	100
Beban Langganan Listrik	58.296.000	39,895,000	18,401,000	32
Beban Langganan Telepon	651.884	775,557	-123,673	-19
Beban sewa	66.960.000	69,120,000	-2,160,000	-3
Total Beban Jasa	569.267.142	553,356,307	15,910,835	3

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 195.819.150*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 195.819.150 dan Rp 236.870.401.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	107,265,000	157,200,000	-49,935,000	-32
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,900,000	4,900,000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80,054,150	71,973,901	8,080,249	11
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,600,000	2,796,500	803,500	29
Total Beban Pemeliharaan	195,819,150	236,870,401	-41,051,251	-17

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas :
Rp 63.940.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 63.940.000 dan Rp 75.500.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	63.940.000	75.500.000	(11.560.000)	(15)
Total Beban Perjalanan Dinas	63.940.000	75.500.000	(11.560.000)	(15)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
241.470.594*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 241.470.594 dan Rp. 284.061.969. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	184,981,935	209,020,724	-24,038,789	-13
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55,243,184	73,795,770	-18,552,586	-34
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,245,475	1,245,475	0	0
Beban Amortisasi Software	-	0	0	0
Total Beban Penyusutan	241,470,594	284,061,969	-42,591,375	-18

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus(defisit)K
egiatan Non
Operasional :
Rp 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non	0	0	0	0

Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus dari kegiatan non operasional	0	0	0	
lainnya				0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional	0	0	0	0
Total Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya bersumber dari Pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp 0. Sedangkan bebannya bersumber dari Beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp 0.

Pendapatan/ beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp
4.738.322.441* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.738.322.441 dan Rp 4.671.268.027.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO : Rp
(3.259.875.785)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2018 adalah sebesar Rp (3.259.875.785) dan Rp (3.434.371.393) . Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/K
esalahan
Mendasar
Koreksi
Yang
Menambah
/Menguran
gi Ekuitas:
Rp.0* Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp (1.400.000). Tahun 2021 ini koreksi yang terjadi pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu berupa Koreksi Atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset

*Selisih Revaluasi
Aset : Rp 0* Selisih Revaluasi Aset Tetap diperoleh dari penilaian ulang aset tetap. Revaluasi dapat diartikan sebagai penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Revaluasi dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian selisih revaluasi aset tetap per akun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per Akun TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian Akun	Nilai Revaluasi
1.	Bangunan Air	0
2.	Bangunan Gedung	0
3.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0
	Total	0

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi : Rp 0*

Koreksi nilai aset non revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi, misalnya koreksi aset yang diakibatkan dari temuan BPK. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp (1.400.000). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ini merupakan koreksi nilai aset tetap non revaluasi.

Rincian transaksi dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Transaksi Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021
(dalam satuan Rupiah)

No	Tanggal Dokumen	Jurnal BMN	Uraian Jurnal	Debit	Kredit	Nilai
1						

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas : Rp
2.650.453.860*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.650.453.860 dan Rp 3.502.825.807.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 42 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	178.661
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,650,275,199
Jumlah	2,650,453,860

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp (6.208.832) sedangkan DKEL sebesar Rp 13.411.473.867.

Sedangkan perbandingannya pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43 Perbandingan DDEL dan DKEL TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
DDEL	178.661	298.980
DKEL	2.650.275.199	3,502,526,827
Jumlah	2,650,453,860	3,502,825,807

E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset / Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada interkal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 357.209 dan Rp.406.928.242.

Sedangkan perbandingannya pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44 Perbandingan Transfer Masuk dan Transfer Keluar TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Transfer Masuk	357.209	0
Transfer Keluar	(406.928.242)	0
Jumlah	(406.571.033)	0

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember
Rp
4.128.900.516 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.128.900.516 dan Rp 4.738.322.441.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada Laporan Keuangan periode berjalan maupun atas laporan keuangan tahun yang lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Terdapat 1 rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Talu dengan kode BA.ES1 005.01 (Badan Urusan Administrasi), yaitu : rekening nomor 653244020351000 atas nama BPG 091 Pengadilan Agama Talu pada Bank Rakyat Indonesia Cabang simpang Empat yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00. Rekening ini sudah memperoleh izin pembukaan dari KPPN Padang dengan nomor S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 tanggal 16 Oktober 2020.

F.2.3. Revisi DIPA

Terdapat 5 kali revisi DIPA yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang selama Tahun 2021. Uraian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Revisi Satker TA 2021

No	Satker	Revisi Ke	Tanggal	Digital Stamp	Keterangan
1	PA TALU	01	13-04-2021	DS.152995025232	Hal III DIPA dan Perobahan pejabat KPA
2	PA TALU	02	13-07-2021	DS.152995025232	Hal III DIPA
3	PA TALU	03	08-10-2021	DS.152995025232	Hal III DIPA
4	PA TALU	04	18-11-2021	DS.0042134423099592	Pagu Minus
5	PA TALU	05	14-12-2021	DS.0042134423099592	Pagu Minus

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Daftar ralat SPM, SSBP, dan SSPB pada satker Pengadilan Agama Talu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45 Daftar Ralat SPM, SSBP dan SSPB TA 2021

No	NOMOR SPM	NOMOR / TANGGAL SP2D	SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
1.	00087/402035/2021	210911301004644/ 02-11-2021	AKUN. 521111	AKUN. 521115	Sudah Dikoreksi
2.	00091/402035/2021	210911301004772/ 04-11-2021	AKUN. 521111	AKUN. 521115	Sudah Dikoreksi
3.	00098/402035/2021	210911301005213/ 01-12-2021	AKUN. 521111	AKUN. 521115	Sudah Dikoreksi
4.	00100/402035/2021	210911301005379/ 03-12-2021	AKUN. 521111	AKUN. 521115	Sudah Dikoreksi

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan yang perlu dicantumkan dalam pos ini.

F.2.6. Monitoring Aplikasi e-Rekon&LK

Tidak ada catatan yang perlu dicantumkan dalam pos ini.